

OPTIMALISASI AKUNTABILITAS DESA BUNGA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN SISKEUDES (STUDI KASUS PADA DESA BUNGA, KEC. MATTIRO BULU, KAB.PINRANG)

Herlinda¹, Yadi Arodhiskara², Sariana Damis³, Fitriani⁴

Email: herlindaaa.02@gmail.com¹, yadhi01@gmail.com², sarianadamis@gmail.com³,
fitri.f29@gmail.com⁴

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

⁴Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91112

Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi akuntabilitas melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bunga, Kabupaten Pinrang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SISKEUDES meningkatkan transparansi, ketepatan waktu pelaporan, dan efisiensi administrasi keuangan desa melalui fitur otomatis dan integrasi data yang memudahkan proses penatausahaan hingga pertanggungjawaban. Faktor pendukung utama meliputi kompetensi SDM, pelatihan bendahara, pemahaman aparat desa, serta ketersediaan perangkat komputer. Selain itu, kemampuan aplikasi dioperasikan secara offline membantu mengatasi kendala jaringan. Namun, tantangan yang masih dihadapi antara lain partisipasi masyarakat yang belum optimal, kebutuhan pendampingan lanjutan pada pembaruan aplikasi, serta infrastruktur internet yang belum stabil. Temuan ini sejalan dengan teori stewardship yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SISKEUDES tidak hanya dipengaruhi aspek teknis aplikasi, tetapi juga kualitas SDM, dukungan infrastruktur, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Kata Kunci: SISKEUDES, Akuntabilitas, Keuangan Desa, Tata Kelola

Abstract

Accountability in village financial management remains a persistent challenge within local governance. This study analyzes the optimization of accountability through the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) in Bunga Village, Pinrang Regency. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with village officials and community representatives, direct observation, and documentation review. The findings show that SISKEUDES improves transparency, reporting accuracy, and administrative efficiency by providing automated features and integrated data processing that facilitate financial recording and reporting. Key supporting factors include the competence of human resources, particularly the village treasurer, availability of training, and adequate computer equipment. The system's offline functionality also helps overcome unstable internet infrastructure. However, challenges remain, such as limited community participation, dependence on external assistance for system updates, and inconsistent network connectivity. These results align with stewardship theory, which emphasizes the responsibility of village government to account for public funds. The study concludes that the success of SISKEUDES implementation is not solely determined by technological aspects but also by human resource capacity, infrastructure support, and active community involvement in financial oversight.

Keywords: SISKEUDES, Accountability, Village Finance, Governance

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia [1].

Akuntansi pemerintahan merupakan proses penyediaan informasi keuangan publik melalui tahapan pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, hingga analisis transaksi keuangan. Informasi ini digunakan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah sekaligus mendukung pengendalian manajemen. Pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan aktivitas yang dilakukan selama periode tertentu [2].

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran sesuai Pasal 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 [3]. Pemerintah desa bertanggung jawab mengelola keuangan dan aset desa secara efisien, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya desa. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan menjadi dasar utama tata kelola desa yang baik. Pengelolaan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi acuan penganggaran desa [16].

APBDes merupakan dokumen rencana keuangan tahunan desa yang disusun bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan oleh kepala desa. APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014. Penyusunan APBDes mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Kemendagri sehingga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa [4].

Desa Bunga merupakan salah satu desa yang telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), meskipun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi mendalam. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual terkait implementasi SISKEUDES di Desa Bunga serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan desa lain dalam mengatasi tantangan serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

SISKEUDES dirancang untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui penyediaan fitur pencatatan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang terintegrasi. Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*), yakni pemerintah desa, untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*), yaitu masyarakat desa [5].

Penerapan akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk menjelaskan penggunaan dana secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi menjadi *facilitatory mechanism* yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana publik [6]. Namun, dalam praktiknya, banyak desa masih menghadapi permasalahan seperti rendahnya transparansi, keterlambatan pelaporan, dan lemahnya pengawasan internal. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana.

Desa yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara konsisten cenderung memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan aplikasi SISKEUDES sebagai upaya digitalisasi tata kelola desa untuk meningkatkan efisiensi administrasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan pemanfaatan SISKEUDES diharapkan desa mampu mengelola anggaran secara lebih sistematis, mudah diawasi, dan lebih akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Bunga, Kabupaten Pinrang. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan pengalaman dan persepsi aparat desa serta masyarakat [7]. Penelitian dilaksanakan di Desa Bunga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Pinrang. Jenis data terdiri atas:

- Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara), pendamping desa, dan perwakilan masyarakat.
- Data sekunder, diperoleh dari dokumen pelaksanaan APBDes, laporan realisasi anggaran, buku kas umum, serta dokumen terkait penggunaan SISKEUDES [3].

Informan ditentukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan peran, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Jumlah informan disesuaikan dengan prinsip *ketercukupan data (data saturation)* ketika informasi yang diperoleh telah

berulang dan tidak menghasilkan temuan baru [10]. Subjek penelitian terdiri atas lima informan utama, yang dipilih berdasarkan peran strategisnya dalam pengelolaan keuangan desa:

Tabel 1. Tabel Informan

No.	Nama	Keterangan
1	Zainuddin	Kepala Desa Bunga
2	Zaenab, S.E	Sekretaris Desa Bunga
3	Sumarwah	Bendahara Desa (Kaur Keuangan desa bunga)
4	Syamsuddin	Perwakilan Masyarakat 1
5	Hasnia	Perwakilan Masyarakat 2

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi tentang akuntabilitas, penggunaan SISKEUDES, serta kendala teknis.
2. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses input data, penatausahaan, dan penyusunan laporan menggunakan SISKEUDES.
3. Dokumentasi, mencakup telaah terhadap laporan keuangan desa, bukti transaksi, dan dokumen resmi lain yang relevan [3].

Keabsahan data diperkuat menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari aparat desa, pendamping desa, dan masyarakat. Sebagai contoh, pernyataan bendahara mengenai ketepatan waktu pelaporan dikonfirmasi melalui pendamping desa dan pemeriksaan dokumen keuangan.
2. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya, klaim mengenai transparansi diuji melalui pengecekan papan informasi desa serta kesesuaian laporan SISKEUDES dengan arsip fisik. Triangulasi ini meningkatkan kredibilitas data karena setiap temuan diverifikasi melalui berbagai sudut dan teknik pengumpulan data [9].

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahap:

1. Reduksi data, yaitu pemilihan, pengelompokan, dan penyederhanaan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan interpretasi.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarvariabel yang menggambarkan implementasi SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas [8].

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Implementasi SISKEUDES dalam Pengelolaan Keuangan Desa

SISKEUDES telah digunakan di Desa Bunga untuk seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan APBDes, pencatatan transaksi harian, verifikasi belanja, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan observasi, seluruh transaksi dicatat melalui menu Buku Kas Umum (BKU) dan pengelompokan akun sudah mengikuti struktur standar dari Kemendagri. Fitur otomatisasi (*auto-posting*) membantu mempercepat proses pencatatan sehingga kesalahan manual dapat diminimalkan.

Bendahara desa secara rutin melakukan input transaksi setiap hari untuk menghindari penumpukan data, sementara perangkat desa lain lebih banyak berperan pada tahap verifikasi dan penyediaan dokumen fisik. Dokumen seperti nota pembelian, bukti pembayaran, dan surat pertanggungjawaban discan dan disimpan sebagai lampiran digital sehingga mempermudah proses pemeriksaan dan rekonsiliasi.

2. Kualitas SDM dalam Mengoperasikan SISKEUDES

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM, terutama bendahara desa, memiliki peran besar dalam kelancaran operasional SISKEUDES. Bendahara yang telah mengikuti pelatihan tingkat kabupaten mampu memahami alur penatausahaan dan penyusunan laporan dengan baik. Berdasarkan wawancara, bendahara menyampaikan bahwa pelatihan yang diterima memberikan pemahaman praktis mengenai cara input transaksi, rekonsiliasi anggaran, dan proses closing akhir tahun.

Namun, kemampuan SDM lainnya masih beragam. Saat observasi, hampir seluruh proses input dilakukan oleh satu orang, yang menunjukkan bahwa operator pendukung belum sepenuhnya menguasai aplikasi. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada bendahara, terutama saat terdapat pembaruan sistem atau kendala teknis. Meskipun demikian, secara umum SDM inti sudah mampu menjalankan aplikasi tanpa kendala berarti.

3. Infrastruktur Teknologi Penunjang SISKEUDES

Desa Bunga memiliki dua perangkat komputer dengan spesifikasi memadai, termasuk penyimpanan cukup dan RAM yang mendukung kelancaran aplikasi. Aplikasi dapat berjalan lancar dalam mode offline, sehingga pencatatan transaksi tidak terhambat meskipun tidak terhubung ke internet.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa jaringan internet merupakan kendala utama. Pada saat peneliti melakukan observasi, proses sinkronisasi laporan realisasi memerlukan waktu cukup lama karena jaringan tidak stabil. Beberapa dokumen bahkan harus diunggah ulang karena koneksi terputus. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan ke tingkat kecamatan atau pihak pendamping desa.

4. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Akuntabilitas

Walaupun laporan yang dihasilkan melalui SISKEUDES sangat terstruktur dan akurat, publikasi laporan kepada masyarakat belum berjalan optimal. Berdasarkan observasi, papan informasi desa tidak selalu diperbarui dengan laporan terbaru, dan tidak ditemukan salinan laporan keuangan tahun berjalan.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, sebagian besar menyampaikan bahwa mereka jarang melihat laporan keuangan desa dipublikasikan secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi masih terbatas. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran juga rendah, sehingga transparansi yang diharapkan belum tercapai seperti yang diamanahkan dalam prinsip tata kelola pemerintahan desa.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Fokus Temuan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kualitas SDM Aparat Desa	Bendahara sudah mengikuti pelatihan dan menguasai input transaksi, penatausahaan, dan penyusunan laporan.	Operator lain belum mahir sehingga beban kerja terpusat pada satu orang.
Infrastruktur & Teknologi	Komputer memadai dan aplikasi dapat berfungsi offline sehingga pencatatan tidak terhambat.	Internet tidak stabil, sinkronisasi data dan unggahan dokumen sering tertunda.
Transparansi Keuangan	Laporan keuangan SISKEUDES lengkap, rapi, dan mengikuti format regulasi pemerintah.	Publikasi laporan kepada masyarakat kurang konsisten; papan informasi jarang diperbarui.
Partisipasi Masyarakat	Masyarakat terlibat dalam musyawarah desa, terutama tahap perencanaan.	Akses informasi terbatas sehingga masyarakat kurang terlibat dalam pengawasan anggaran.
Pendampingan Teknis	Tersedia pendamping desa untuk membantu saat ada masalah teknis atau pembaruan aplikasi.	Ketergantungan tinggi pada pendamping karena beberapa aparat belum mandiri dalam mengoperasikan SISKEUDES.

Sumber: Data diolah dari Hasil Wawancara

Pembahasan

1. Kualitas SDM dan Pengaruhnya terhadap Akuntabilitas

Kualitas SDM aparat desa terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penerapan SISKEUDES karena kompetensi bendahara dan operator sangat berpengaruh terhadap keakuratan pencatatan serta ketertiban pelaporan. Aparat yang sudah mengikuti pelatihan mampu memahami alur penatausahaan, mengoperasikan menu aplikasi, dan menyesuaikan proses pencatatan dengan ketentuan Permendagri secara mandiri. Kondisi ini membuat laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar regulasi. Sebaliknya, aparat yang kurang menguasai aplikasi cenderung melakukan input data secara tidak konsisten, mengalami kesalahan teknis, serta membutuhkan pendampingan intensif dari kecamatan atau pendamping desa.

Situasi ini menunjukkan bahwa SDM tidak hanya berperan dalam aspek teknis, tetapi juga menentukan kredibilitas data dan ketepatan waktu pertanggungjawaban. Semakin baik kualitas SDM, semakin tinggi pula reliabilitas dan akuntabilitas laporan keuangan desa. Temuan ini sejalan

dengan penelitian [11], yang menyatakan bahwa literasi digital dan pemahaman regulasi oleh aparat desa merupakan variabel paling kuat dalam meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sementara itu, [12] menegaskan bahwa kompetensi SDM berpengaruh langsung pada kemampuan desa menyampaikan informasi keuangan secara transparan. Dalam konteks teori *stewardship*, aparat desa yang kompeten mampu menjalankan perannya sebagai pengelola amanah publik dengan lebih profesional dan bertanggung jawab [5].

2. Infrastruktur Teknologi dan Dampaknya terhadap Akuntabilitas

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat komputer desa sudah memadai, infrastruktur internet yang tidak stabil menjadi hambatan utama dalam proses sinkronisasi dan verifikasi pelaporan. Aplikasi SISKEUDES memiliki fitur offline yang membantu proses pencatatan harian, namun tahapan akhir seperti pencetakan laporan, pembaruan aplikasi, dan validasi data tetap membutuhkan jaringan internet yang stabil. Ketika jaringan lambat, bendahara harus menunda pengiriman laporan atau melakukan verifikasi ulang sehingga memperpanjang waktu penyelesaian administrasi.

Keterbatasan infrastruktur ini memengaruhi dimensi akuntabilitas waktu, karena pelaporan menjadi kurang tepat waktu dan akses informasi digital menjadi terbatas. Infrastruktur juga mempengaruhi keterbukaan data, sebab laporan tidak dapat dipublikasikan melalui media desa apabila jaringan internet tidak mendukung. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian [11], yang mengidentifikasi infrastruktur digital sebagai hambatan umum dalam penggunaan SISKEUDES di berbagai desa. Temuan [12] juga menekankan bahwa sistem pelaporan digital hanya dapat berjalan optimal apabila didukung perangkat dan jaringan yang memadai. Dalam perspektif *stewardship*, infrastruktur berperan sebagai *enabler* yang memperlancar pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara tepat waktu dan transparan [5].

3. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Akuntabilitas

Walaupun SISKEUDES telah menghasilkan laporan keuangan desa yang rapi, lengkap, dan sesuai format standar, temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi belum optimal karena hasil laporan tidak dipublikasikan secara konsisten kepada masyarakat. Papan informasi desa jarang diperbarui dan publikasi digital belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh akses terhadap informasi keuangan desa sehingga fungsi pengawasan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Minimnya partisipasi masyarakat memperlemah akuntabilitas karena masyarakat tidak memiliki cukup informasi untuk menilai apakah anggaran digunakan sesuai rencana. Temuan ini sejalan dengan [11], yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat partisipasi membuat akuntabilitas desa hanya berjalan pada lingkup internal pemerintahan. Sementara itu, [12] menunjukkan bahwa desa yang secara aktif mempublikasikan laporan keuangan melalui papan informasi dan media digital memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Dalam konteks teori *stewardship*, keterlibatan masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial yang tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral pemerintah desa kepada masyarakat [5]. Dengan demikian, semakin besar keterlibatan masyarakat, semakin kuat pula akuntabilitas pemerintah desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bunga memberikan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Faktor utama yang mendukungnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat desa, infrastruktur teknologi yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran desa.

Meskipun ada tantangan seperti akses internet yang tidak stabil dan keterbatasan partisipasi masyarakat, pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah perbaikan. Penggunaan SISKEUDES menyederhanakan administrasi keuangan, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas kinerja pemerintah desa.

Saran

1. Peningkatan Kompetensi SDM adakan pelatihan rutin dan pendampingan langsung agar aparat desa lebih mahir mengoperasikan Siskeudes.
2. Penguatan Infrastruktur Teknologi tingkatkan kualitas perangkat, terutama komputer dan koneksi internet, untuk mendukung operasional Siskeudes.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dukasakan masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalame Musdes dan mekanisme pengaduan untuk memperkuat pengawasan.
4. Pemeliharaan Perangkat Rutin terapkan sistem pemeliharaan berkala untuk perangkat keras dan lunak guna mencegah gangguan teknis.
2. Pemberdayaan Kelompok Pengawasan bentuk kelompok pengawasan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
3. Kolaborasi Eksternal jalin kemitraan dengan penyedia layanan internet dan konsultan keuangan untuk mendukung operasional dan penyelesaian masalah teknis Siskeudes.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- [2] Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- [3] Prasetyo, A. G., Muis, A., & Negara, L. A. (2015). Pengelolaan keuangan desa pasca UU No. 6 tahun 2014 tentang desa: Potensi permasalahan dan solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16-31.
- [4] Kementerian Dalam Negeri. Pedoman Penyusunan APBDes sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014. Jakarta: Kemendagri; 2014.
- [5] Putri, R. R., & Subardjo, A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(12).
- [6] Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- [7] Harrison, R. L., Reilly, T. M., & Creswell, J. W. (2020). Methodological rigor in mixed methods: An application in management studies. *Journal of mixed methods research*, 14(4), 473-495.
- [8] Miles MB, Huberman AM, Saldana J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- [9] Moleong L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [10] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Anggraeni, M., & Fitriyah, H. (2024). Optimizing Village Accountability Through SISKEUDES Financial System Implementation: Optimalisasi Akuntabilitas Desa Melalui Implementasi Sistem Keuangan SISKEUDES. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(2), 10-21070.
- [12] Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50-58.
- [13] Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(1), 55-76.
- [14] Sulistyowati, S., & Fitriyah, E. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal of social science and Business*, 3(3), 299-305.

- [15] Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 63-76.
- [16] Arodhiskara, Y., & Syukri, F. (2025). Pengaruh Nilai Siri Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. *Center of Economic Students Journal*, 8(1), 284-293.